

KLIPING BERITA KEGIATAN KONSULTASI RUU DESA	
Nama Media	PORTIBI
Edisi	Selasa, 4 Maret 2008
Rubrik	Medan
Halaman	2

Pemerintah Perlu Memikirkan Upaya Pemberdayaan Desa

MEDAN (Portibi DN^P) : Inspektur Jenderal (Irjen) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri (Depdagri) mengatakan bahwa sekarang ini berdasarkan data yang diterima masyarakat kita masih banyak tinggal di desa.

Dengan masih banyaknya masyarakat kita tinggal di desa maka perlu kiranya pemerintah memikirkan bagaimana memberdayakan desa untuk menjadi bagian dari pemerintahan yang otonom. Walaupun diketahui

bahwa desa sesuai dengan Permendagri No 30/2006 adalah pelimpahan dari semua tugas dan wewenang pemerintahan di atasnya.

"Dengan jumlah 65 ribu desa yang ada di Indonesia serta belum lagi adanya rencana pemekaran desa diberbagai propinsi maka sudah bisa diperkirakan bahwa 54 persen masyarakat tetap dominan tinggal di desa. Tapi sampai sekarang desa belum juga mendapatkan haknya sebagai pengelola desa secara utuh dan

sempurna," sebut Eko Prastio Irjen PMD Depdagri dalam Konsultasi Publik RUU Desa yang dilaksanakan oleh IRE Yogyakarta, USAID, DRSP, Fitra Sumatera Utara, Senin (3/3) di Hotel Madani Medan.

Dikatakannya, bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Desa yang sekarang sedang dibahas oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) adalah bertujuan untuk memberdayakan desa menjadi lebih berpotensi lagi dalam mengembangkan desa dari

berbagai sumber daya alam yang ada. "Selama ini untuk urusan Alokasi Dana Desa (ADD) masih diatur oleh Kabupaten/kota sementara kalau dipercayakan kepada Desa untuk mengelolanya secara penuh maka dipercaya desa tersebut akan lebih maju lagi," terang Prastio.

Namun sesuai Permendagri 30/2006 bahwa ada 32 bidang serta 225 urusan yang harus diserahkan kepada desa sebagai bentuk tanggungjawab desa dalam mengelola desanya. ■ P18